

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan sejarah yang panjang, hampir tiga setengah abad Indonesia harus berjuang untuk kemerdekaannya. Masuknya Belanda yang kemudian dikenal dengan kolonial merupakan awal terjajahnya bangsa ini, yang kemudian disusul oleh masuknya Jepang pada bulan Maret 1942.¹

Indonesia merupakan negara yang mempunyai letak wilayah tropis, tentunya sangat kaya akan sumberdaya alam, tidak terkecuali hasil rempah-rempahnya. Pada abad ke-16, Belanda masuk ke Indonesia yang tujuan utamanya adalah untuk mencari rempah-rempah yang merupakan komoditas penting saat itu. Tercatat negara Inggris dan Portugis juga pernah mencari rempah-rempah di Indonesia. Selain faktor-faktor ekonomi, faktor agama ikut juga mempengaruhi masuknya bangsa Eropa tersebut

Pertarungan untuk menguasai rempah-rempah oleh bangsa-bangsa Eropa menyebabkan saling bertarungnya bangsa tersebut untuk menguasai semua sumber daya alam Indonesia. Inilah yang menyebabkan Belanda menerapkan sistem dagang V.O.C (Verenigde Oost-Indische Compagnie) yaitu sistem yang memonopoli perdagangan rempah-rempah. Akan tetapi Belanda ternyata tidak cukup puas hanya menguasai perdagangan pada masa itu, timbul keinginan pihak

¹ L. O. F. ... A. B. ... "Sejarah ... dan ..." (Jakarta: ... 1977)

Belanda untuk menguasai Indonesia secara keseluruhan. Pada masa inilah istilah *kolonialisme* dikenal yang berasal dari kata *koloni* yaitu keinginan suatu bangsa untuk menaklukkan bangsa lain yang ditandai dengan dominasi politik, eksploitasi ekonomi, dan penetrasi kebudayaan.

Indonesia pada awal penjajahan Belanda masih menganut sistem kerajaan, yang saling terpisah, oleh karena itu untuk memuluskan niat tersebut Belanda menerapkan politik *Devide Et Impera*, yaitu politik pecah belah. Pertikaian antar kerajaan pun akhirnya tidak terelakkan, dan sedikit demi sedikit kerajaan di Indonesia jatuh ketangan Belanda.

Selama penjajahan Belanda hampir keseluruhan rakyat Indonesia menderita, hal ini disebabkan Belanda mengambil seluruh kekayaan alam tanpa sedikitpun menyisakan bagi warga pribumi. Dimana Belanda menciptakan sistem *Cultuurstelsel* yaitu usaha Belanda untuk memulihkan krisis keuangan di negerinya akibat kekalahan Belanda terhadap Inggris.² Kerajaan-kerajaan yang ada pada waktu itu tidak bisa berbuat banyak karena kekuasaannya telah diambil alih oleh Belanda. Jadi, saat itu raja hanya merupakan simbol semata, tanpa mempunyai kekuasaan politik ataupun untuk mengurusinya. Beberapa kerajaan yang tidak menghendaki ikut campur tangan Belanda melakukan perlawanan menentang segala bentuk usaha uasah Belanda yang dianggap tidak manusiawi, akan tetapi karena perjuangannya yang bersifat lokal dan tidak bersatu, akhirnya perlawanan tersebut mudah dipatahkan dan dilumpuhkan.

² C.S.T Kansil dan Julianto, "Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa" (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 100.

Pada tahun 1870 bahaya kelaparan telah mengancam Hindia Belanda akibat sistem tanam paksa, keadaan ini menyebabkan timbul pergolakan menuntut pemerintah Belanda agar memperhatikan nasib rakyat Hindia Belanda (Indonesia). Beberapa tokoh yang mengusulkan perhatian terhadap rakyat Hindia Belanda adalah Van Deventer, Van Kol dan Brooshoff yang menuntut perbaikan-perbaikan dalam bidang *irigasi, edukasi dan emigrasi*, yang kemudian terkenal dengan *trilogi Van Deventer*.³

Dengan diterapkan politik etis maka beberapa golongan bumiputra akhirnya dapat mengenyam pendidikan walaupun dalam kalangan tertentu yaitu kalangan priyayi dan birokrat kolonial Belanda. Akibatnya banyak rakyat yang tidak dapat mengenyam pendidikan khususnya rakyat miskin. Dengan alasan inilah yang menyebabkan Dr. Wahidin Soediro Hoesodo dan dr. Soetomo mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo pada dasarnya bukanlah gerakan politik akan tetapi masih bersifat sosial karena pada tahun 1900-an ada peraturan yaitu pasal 111 dari RR yang berisikan larangan pendirian organisasi yang bersifat politik.

Selain Budi Utomo yang bergerak dibidang sosial timbul juga kesadaran berorganisasi dalam kalangan umat Islam, dengan mendirikan Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 yang mempunyai tujuan melawan monopoli Tionghoa.

Pada tanggal 23 Mei 1920 Partai Komunis Indonesia dibentuk dan Samaun menjabat sebagai ketua PKI Semarang. Sebelum PKI terbentuk, awalnya dimulai dengan nama *Indische Socialistisch Democratisch Vereniging (ISDV)* yang dipimpin oleh Sneevliet dan Samaun. Pola pergerakannya cenderung menggunakan strategi *Ifiltrasi* kedalam Sarekat Islam yang menyebabkan Sarekat Islam pecah menjadi dua SI Merah dan SI Putih. SI Merah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya PKI.

Pada tahun 1900 ini ada beberapa organisasi terbentuk: INSULINDE yang didirikan pada tahun 1907 di Bandung, organisasi ini bersifat campuran. Pada tahun 1912 namanya di ubah menjadi *Indische Partij*, pimpinan organisasi ini ialah Douwes Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Organisasi lainnya Muhammadiyah berdiri tahun 1912 yang didirikan KH. Ahmad Dahlan, gerakan ini pada pokoknya menghendaki reformasi dalam agama Islam, memajukan pengajaran yang berdasarkan Islam serta membersihkan agama dari pengaruh tradisi⁴.

Selain adanya kesadaran di kalangan tokoh pejuang tentang persatuan dan pentingnya organisasi, kesadaran tentang nasionalisme itupun ikut tumbuh. Hal ini disebabkan beberapa peristiwa dari perkembangan beberapa bangsa: *pertama*, Perang antara Rusia dan Jepang di tahun 1904-1905, terlihat sebagai kekalahan satu kekuatan bangsa Eropa oleh negara timur, dan akibatnya mempengaruhi suasana politik seluruh kawasan Timur Jauh. Di Indonesia hal itu terutama mempengaruhi kalangan muda yang terpelajar. Kemudian terjadi Perang Dunia

⁴ Ibid, hlm, 30

Pertama yang mengakibatkan kekurangan pangan, kekacauan, inflasi, dan meningkatnya penderitaan massa, yang pada giliran berikutnya hal itu menyebabkan berberapa gelombang kerusuhan dan militansi di kalangan kaum tani dan buruh. Sejarah gerakan nasionalis modern, termasuk PKI, dimulai pada periode itu.

Kedua, revolusi Prancis (1789), yang ditandai dengan runtuhnya benteng Bastille, sebagai lambang penindasan dan penderitaan rakyat Perancis dibawah kekuasaan Raja-raja yang berkuasa mutlak. Ucapan Raja Lodwijk (Louis) XIV yang terkenal saat itu "negara adalah saya" (*L'Etat-cast' moi*). Pada dasarnya Revolusi Perancis merupakan imbas dari Revolusi Amerika Serikat, dimana rakyat menghendaki kebebasan: bebas berbicara (*freedom of speech*), bebas beragama (*freedom of religion*) bebas berkeinginan (*freedom of want*) dan bebas dari rasa ketakutan (*freedom of fear*).⁵ Kebebasan inilah yang dituntut rakyat, yang membuahkan demokrasi di Amerika Serikat yang ber-inti-kan pemerintahan oleh rakyat dengan semboyan: dari rakyat (*fom the people*), oleh rakyat (*by the people*) dan untuk rakyat (*for the people*).⁶

Kemudian di Perancis semangat demokrasi ini menjalar ketengah-tengah masyarakat dan tidak menghendaki kekuasaan raja absolut dimana rakyat menghendaki kemerdekaan (*liberte*), persamaan (*egalite*) dan persaudaraan (*fraternite*), merah, putih, biru.⁷

Ketiga, Revolusi Tiongkok (1911) dianggap sebagai pembaharuan Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen, dimana sebelumnya Cina di diperintah oleh raja-

⁵ A. W. Widjaya. "Indonesia Asia Afrika Non blok" (Jakarta. PT. Bina Aksara 1986). hlm, 6

⁶ Ibid, hlm, 6

⁷

raja absolute "keturunan langit". Sun Yat Sen membawa angin segar dan angin baru bagi demokrasi Cina. Pada waktu itu pemikiran Sun Yat Sen yang dikenal dengan *San Min Chu I* (Min Tsu, Min Chuan dan Min Sheng). Nasionalisme, Demokrasi dan Sosialisme yang didengungkan oleh Sun Yat Sen kemudian diwariskan kepada Chiang Kai Shek, akan tetapi Chiang Kai Shek ternyata tidak dapat melanjutkan pemikiran diatas. Timbul perlawanan Mao Tse Tung (Kao Chan Tang) yang berpaham komunisme terhadap Chiang Kai Shek (Kao Min Tang) semakin memperjelas kegagalan Chiang Kai Shek mempersatukan Cina, sehingga pada tahun 1949 Chiang Kai shek tersingkir ke kepulauan Taiwan.⁸

Keempat, Selain mendapat inspirasi dan semangat baru dari beberapa revolusi diatas, para pejuang pergerakan bangsa Indonesia juga dipengaruhi oleh pemikir-pemikir Barat seperti J.J Rousseau (1762), Ernest Renan (1869), Otto Bauwer (1907) dan lain-lain. Menurut Ernest Renan, Bangsa adalah gerombolan manusia yang mau bersatu dan merasa dirinya bersatu (kehendak untuk bersatu). Sedangkan menurut Otto Bauwer, Bangsa adalah satu persatuan perangai/*character*, yang timbul karena persatuan nasib.

Nasionalisme di negara-negara barat lahir sebagai reaksi dari revolusi industri, sebuah gejala yang lahir sebagai akibat adanya pergeseran dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Namun di negara-negara dunia ketiga, nasionalisme lahir sebagai sikon perlawanan terhadap Imperialisme dan Kapitalisme.

Berbeda sekali dengan sikap-sikap perlawanan tadi, gerakan nasionalisme mewujudkan corak baru sebagai jawaban terhadap struktur dan sistem kolonial, maka periode 1900-1942 sebagai periode gerakan dapat di bedakan dengan corak masa-masa sebelumnya. Pada perkembangan pergerakan perjuangan sejarah Indonesia di mulai setelah Sumpah Pemuda 1928 yang di ikrarkan.

Pada Perang Dunia ke II negeri Belanda jatuh pada kekuasaan Nazi Jerman, hal ini merubah peta geopolitikan di bangsa Indonesia terutam dalam konsep perjuangan yang akhirnya membawa pada kesimpulan tuntutan untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada masa Perang Dunia ke II ini para tokoh politik Indonesia telah memprediksikan bahwa Jepang yang berpaham fasis turut serta terlibat dan memihak pada Jerman pada pertempuran di Pasifik, prediksi merembetnya perang ke Indonesia akhirnya terbukti benar adanya. Juga di ramalkan akan adanya pertarungan antara kolonialisme Belanda dengan Jepang. Masuknya Jepang ke Indonesia akhirnya menimbulkan pro dan kontra dikalangan tokoh politik, dalam permasalahan ini Indonesia masih bingung menentukan cara untuk menghadapi Jepang. Dalam menghadapi masalah ini jauh-jauh hari sebelumnya Tan Malaka mengeluarkan buku yang berjudul *Naar de Republik Indonesia* (menuju republik Indonesia) yang diterbitkan di Kanton, yang berisikan permasalahan-permasalahan yang harus di selesaikan menuju Indonesia merdeka, diantaranya ekonomi, politik, sosial, pelajaran dan pendidikan, militer, polisi dan rencana aksi.⁹

⁹ *Official Book "Demokrasi dan ..."*

Jepang masuk Indonesia pada tanggal 19 Maret 1942 dengan membawa semboyan Asia Raya, pro dan kontra tokoh politik dalam menghadapi Jepang melahirkan dua kelompok, antara yang menyambut dan memusuhkannya, disini mulai terlihat adanya garis pemisah antara tokoh politik. Kelompok pertama cenderung komparatif yaitu bekerja sama dengan Jepang dengan alasan mempergunakan alat-alat Jepang untuk perjuangan kelompok ini pelopori oleh Soekarno-Hatta. Pada bulan Maret demi menghadapi perang Pasifik dibentuklah Putra (pusat tenaga rakyat) yang tujuannya memperkuat pasukan militer Jepang yang diketahui oleh Soekarno. Sedangkan pihak yang tidak sepakat bekerja sama dengan Jepang melakukan perlawanan "dibawah tanah". Tokoh pergerakan ini adalah Amir Syarifudin dan Sutan Sjahrir.

Pada tanggal 6 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI), dan ketua diserahkan pada Soekarno dan Hatta. pada tanggal 14 Agustus 1945 akhirnya Jepang bertekuk lutut pada Sekutu, hal ini diketahui oleh tokoh-tokoh Indonesia, masa-masa kelumpuhan Jepang lagi-lagi disikapi secara berbeda oleh tokoh-tokoh politik, ada sebagian tokoh seperti Soekarno dan Hatta bersifat pasif yang menginginkan Proklamasi yang sesuai skenario yang sudah ditentukan Jepang, sedangkan dikalangan pemuda menginginkan kemerdekaan tanpa menunggu dari Jepang, tokoh pergerakan ini di motori oleh Chairul Saleh, Soekarni dan Wikana. Akhirnya golongan pemuda berinisiatif untuk menculik Soekarno agar memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sjahrir dalam menyikapi kekalahan Jepang menilai bangsa Indonesia harus segera memproklamkan kemerdekaan

Indonesia. Menurut Sjahrir ini perlu dilakukan sendiri oleh bangsa Indonesia, karena PPKI dianggap sebagai organisasi buatan Jepang, selain itu agar sekutu tidak mengambil keputusan apapun terhadap Indonesia. Sebenarnya dalam memproklamkan kemerdekaan ada sebagian tokoh politik yang cenderung menilai bahwa kemerdekaan harus diproklamkan meski tanpa kehadiran Soekarno, akan tetapi Sjahrir menilai bahwa satu-satunya tokoh yang mempunyai cukup berwibawa untuk memproklamkan kemerdekaan adalah Soekarno. Menurut Sjahrir, hanya Soekarno yang mempunyai cukup pengaruh terhadap rakyat Indonesia.¹⁰ Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar RI. Selanjutnya Soekarno diangkat jadi Presiden dan Hatta sebagai wakilnya. Dan pada hari yang sama Jendral Yamamoto, Gunseikan, secara resmi mengatakan kepada Soekarno dan Hatta, bahwa Jepang telah menerima deklarasi Postdam, oleh karena itu *status quo* kepulauan Indonesia harus dipelihara dan Jepang tidak membantu usaha kemerdekaan melainkan menjaga keamanan dan ketertiban sampai tentara sekutu mengambil alih tugas itu.¹¹

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diubah menjadi Komite Nasional Indonesia (KNI) pada rapat KNI pada tanggal 18 Agustus di putuskan untuk membubarkan PETA (Pembela Tanah Air), dan membentuk BKR (Badan keamanan rakyat). Tugas BKR adalah menjaga keamanan Rakyat bersama jawatan-jawatan negeri yang bersangkutan. Usia BKR tidaklah panjang pada tanggal 5 Oktober pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR)

¹⁰ Aboe Bakar Loebis "Kilas Balik Revolusi", (Jakarta, UI press, 1995). Hlm, 97-98.

¹¹ Ibid. hlm, 110

untuk menggantikan BKR. BKR yang anggota-anggotanya terdiri atas bekas PETA dan Heiho, bekas Barisan Pelopor, mahasiswa dan pelajar serta pemuda lain dengan sendirinya terserap menjadi inti dari tentara yang baru jadi ini. Sedangkan KNI yang telah terbentuk berubah sifat dari Badan Pembantu Presiden menjadi Badan Legislatif, dari Badan Kemasyarakatan menjadi badan negara. Serta di usulkan untuk membentuk Badan Pekerja untuk menjalankan tugas Komite Nasional, maka dibentuklah Badan Pekerja KNIP dan memilih Sutan Sjahrir sebagai ketua yang diusulkan oleh para pemuda seperti Soekarni, Soepono, Soebadio dan Ny. Mangunsakoro dan lain-lain. Dengan berubahnya KNI maka perubahan sifat pemerintah dari pemerintah *Presidendeel* menjadi pemerintah parlementer menjadi mulus. Sjahrir yang sudah menjadi ketua Badan Pekerja KNIP di tunjuk Soekarno menjadi perdana menteri yang pertama dalam sistem pemerintahan parlementer.

Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 merupakan pintu menuju babak baru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sebuah babak di mana bangsa Indonesia berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintah dari tangan penjajah. Namun, kemerdekaan yang diperolehnya itu ternyata mengalami gejolak yang bukan saja berasal dari luar, yaitu adanya keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, tetapi juga yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri, seperti persaingan perebutan kekuasaan. Terutama yang berasal dari dalam, gejolak yang timbul mengakibatkan ketidakstabilan serta ambivalensi politik yang besar. Pada tanggal 10 November 1945, Kementerian Penerangan mengumumkan nenerbitan sebuah bulet yang ditulis oleh Sjahrir Dalam hal ini...

"Perjuangan Kita". Tulisan itu mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pemikiran politik di Indonesia, terutama di kalangan pemuda. Soebadio Sastrosatomo, seorang pengikut Sjahrir bahkan berpandangan bahwa kalau Maklumat Politik tanggal 1 November 1945 merupakan pedoman untuk negara, maka buklet tersebut dimaksudkan untuk rakyat dan masyarakat Indonesia. Dalam buklet itu, Sjahrir menegaskan, terutama kepada pemuda untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab, berjuang dengan segenap jiwa revolusionernya. Ia juga menyerukan untuk menghindari kekerasan anti asing dan anti-indo, serta mengerahkan kekuatan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Ide tentang revolusi demokratis itu dikemukakan Sjahrir untuk melawan kecenderungan fasisme yang masih membekas akibat pengaruh pendudukan Jepang. Keberhasilan Sjahrir menduduki jabatan sebagai perdana menteri tak sertamerta menghilangkan gejolak-gejolak yang ada. Persoalan demi persoalan muncul akibat ketidakpuasan terhadap kabinet yang baru terbentuk itu. Anderson (1988) menilai ada dua hal yang menjadi fokus permasalahan. Pertama, kabinet tersebut jelas tidak mewakili semua golongan, bahkan hanya dikuasai oleh pemimpin-pemimpin dari Partai Sosialis dan beberapa orang profesional yang buta politik. Kedua, isi program kabinet tersebut yang mengutamakan diplomasi daripada perlawanan bersenjata. Salah satu kelompok yang keras menentang kebijakan-kebijakan Sjahrir itu adalah kelompok Tan Malaka. Kelompok penentang ini terutama sekali para pemuda menyatakan bahwa kemerdekaan yang telah diproklamasikan bukan merupakan sesuatu yang harus dirundingkan.

Kemerdekaan itu adalah sesuatu yang harus dirundingkan.

Tan Malaka beserta kelompoknya merupakan tokoh-tokoh yang menolak politik diplomasi yang di jalankan Sjahrir. Pengakuan kemerdekaan 100% merupakan tantangan langsung atas kebijakan politik Sjahrir yang mengambil sikap berunding dengan sekutu Belanda. Tan Malaka mengatakan kemerdekaan 100% harus diakui terlebih dahulu baru perundingan dilakukan untuk menetapkan pengakuan itu dan kemudian mengadakan perjanjian berdasarkan pengakuan tersebut. Dengan kata lain harus ada pengakuan terlebih dahulu baru berunding, kalau ini terlaksana maka perundingan yang ada adalah perundingan dua negara merdeka. Menurut Tan Malaka ini sangat penting, karena dengan kondisi seperti ini *Bargaining Position* Indonesia pun jelas, dan dalam posisi yang seimbang sehingga tekanan sebelum dan sesudah perundingan dari pihak musuh tidak ada. Tentu kita tidak mau ditekan untuk mentaati perjanjian-perjanjian yang akan digelar, demikian dengan tegas Tan Malaka mengatakan hal itu.¹²

Dari uraian diatas penulis mencoba mengangkat dan membandingkan, pemikiran tokoh Sutan Sjahrir dan Tan Malaka memandang dan menata masa depan negara yang baru merdeka pasca proklamasi kemerdekaan, setelah sekian lama negara berada dalam keadaan yang tidak menentu berada dalam suasana penindasan, penderitaan berkepanjangan, di tangan penjajah. Karena penulis menganggap kedua tokoh ini adalah tokoh yang sama-sama kontroversial dalam sejarah perjuangan Indonesia. Kedua tokoh ini pula yang sering bersinggungan atau berbeda pendapat dalam urusan politik ataupun strategi dalam perjuangan.

¹² Tan Malaka, *...*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah yang dapat disimpulkan yaitu:

1. Bagaimana pemikiran Politik Sjahrir tentang:
 - a. Revolusi di Indonesia
 - b. Perjuangan Kita
 - c. Sosialisme Kerakyatan
2. Bagaimana Pemikiran politik Tan Malaka tentang:
 - a. Revolusi di Indonesia
 - b. Minimum Program
 - c. Revolusi Sosial
3. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran politik Sjahrir dan Tan Malaka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan, maka tujuan dari penelitian kali ini adalah:

1. Untuk mengetahui posisi dan peranan Sutan Sjahrir dan Tan Malaka pada masa Revolusi.
2. Melakukan penggalian dan pengembangan pemikiran politik dalam rangka menambah khasanah pengetahuan politik dalam negeri dalam hal ini pemikiran politik Sutan Sjahrir dan Tan Malaka. Karena kedua tokoh ini merupakan tokoh yang cukup aktif dalam sejarah bangsa Indonesia.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Pemikiran Politik

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa phenomena, dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat di pakai sebagai batu loncatan.

Teori (*theory*) meliputi penyampaian pandangan dan pemikiran; teori diharapkan memberikan petunjuk. Dalam bentuknya yang sederhana, teori adalah serangkaian generalisasi yang tersusun secara sistematis. Secara spesifik, teori adalah sekumpulan generalisasi dan prinsip-prinsip yang koheren (logis, saling berkaitan) mengenai praktek atau sesuatu yang menjadi objek telaah (*inquiry*). Segenap generalisasi dan prinsip ini bisa bersifat hipotesa maupun konseptual. Deskripsi (*description*) adalah pernyataan mengenai bagian-bagian atau hubungan-hubungan dari sesuatu hal, yang bisa dirumuskan melalui klasifikasi, identifikasi, dan spesifikasi. Analisa (*analysis*) adalah pemisahan atau pemecahan suatu keseluruhan utuh menjadi bagian-bagian pokoknya, lalu masing-masing dikaji secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis juga bisa dilakukan dengan klasifikasi dan penjelasan rinci (*explication*). Sedangkan sintesis (*synthesis*) adalah penggabungan bagian-bagian menjadi satu keseluruhan utuh, atau

pemikiran yang koheren atau kohesif. Secara umum semua ini adalah aspek-aspek dari teori dan telaah.¹³

Menurut Miriam Budiharjo¹⁴ teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas, a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan tersebut, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang timbul oleh situasi politik yang tertentu, d) kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak, dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan sebagainya.

Sementara itu dalam keterangan lain Thomas P. Jenkin seperti dikutip oleh Miriam Budiharjo, membagi dua macam teori politik.

A. Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik. Karena adanya unsur norma-norma dan nilai maka teori-teori ini boleh dinamakan mengandung nilai. Yang termasuk dalam golongan ini antara lain:

- a. Filsafat politik, teori ini mencari penjelasan yang berdasarkan rasio. Pokok pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta seperti metaphysika dan epistemologi harus dipecahkan dulu sebelum persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi. Misalnya menurut Plato, keadilan

¹³ Ronald H. Chilcote, "Teori perbandingan Politik: Penelusuran paradigma" (Jakarta, Raja Grafindo, 2003). Hlm, 21

merupakan hakekat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai kehidupan yang baik.

b. Politik sistematis, teori ini berbeda dengan filsafat politik, ia mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima masa itu. Jadi ia tidak menjelaskan asal usul lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba merealisasikan norma-norma itu dalam suatu program politik. Teori ini merupakan kelanjutan dari filsafat politik.

c. Ideologi politik, teori ini adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dan mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang itu dalam menentukan tingkah laku politiknya. Nilai-nilai dan ide ini merupakan suatu sistem yang berpautan. Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi politik mencakup pembahasan dan diagnose, serta saran-saran mengenai bagaimana mencapai tujuan yang ideal itu. Ideologi mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi.

B. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas phenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan bebas nilai. Ia biasanya berifat deskriptif dan

Pemikiran adalah aplikasi rasio manusia yang dihasilkan dari penyusunan premis-premis yang diketahui untuk mendapatkan konklusi-konklusi yang belum diketahui. Pemikiran-pemikiran manusia dalam mendasarkan pandangannya, pokok-pokok pikirannya dan kaidah-kaidahnya akan bersumber pada pandangan umum dan sistem kepercayaan. Jadi pemikiran politik adalah macam pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh masyarakat politik.¹⁵ Pemikiran politik dalam kajiannya tidak terlepas kajian ilmu politik, yaitu mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan tersebut, hubungan negara dengan negara lain dan hubungan negara dengan warga negaranya.

Kita dapat mendefinisikan pemikiran politik dengan melihat masalah-masalah dan topik-topiknya, yaitu macam pemikiran yang bertujuan untuk memberikan solusi atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh "masyarakat politik". Namun, apa itu masyarakat politik? Dan apa itu politik? Suatu masyarakat dikatakan masyarakat politik jika ia mempunyai lembaga kekuasaan yang khusus, yang dapat diadopsi, yang mengatur masyarakat. Kemudian hukum dan undang-undang itu, ia aplikasikan kepada masyarakat dan memaksakan mereka untuk mematuhi. Lalu Undang-undang itu dipatuhi secara umum oleh masyarakat dan diakui mempunyai kekuatan dengan sukarela atau terpaksa, juga ia diakui sebagai kekuasaan tertinggi dalam masyarakat itu dan yang dapat memberikan material."¹⁶ Sedangkan, politik didefinisikan oleh kamus Litre (1870)

¹⁵ Tijani Abd. Qadir Hamid "Pemikiran Politik Dalam Al-Qur'an" (Jakarta, Gema Insani Press), hlm, Viii.

¹⁶ Terjemahan bebas dari Anthony Dyinton, "Political Philosophy" (Oxford University press)

sebagai,"politik adalah ilmu memerintah dan mengatur negara.¹⁷" Dan kamus Robert (1962) mendefinisikan sebagai," politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia."¹⁸ Namun, definisi modern mencakup pengaturan negara dan mengatur pola kemasyarakatan manusia, sehingga kata "memerintah dan mengatur" itu, saat itu berarti dalam seluruh masyarakat adalah kekuasaan terorganisasi serta lembaga-lembaga kepemimpinan dan pemilik kekuasaan penekan.

2. Konsep tentang ideologi

- a. Ideologi politik merupakan seperangkat nilai yang disusun untuk memberi pengesahan kepada pemerintah sehingga ideologi pada dasarnya membenarkan adanya status-quo.
- b. Ideologi juga dapat digunakan oleh para pembaharu atas pemborontak untuk melawan atau menyerang status-quo
- c. Ideologi bisa mempersatukan rakyat dalam suatu negara atau pengikut suatu gerakan yang akan merubah negara.
- d. Ideologi merupakan sarana komunikasi simbolik antar pemimpin dan pengikut.
- e. Ideologi merupakan suatu pedoman untuk memilih kebijaksanaan dan perilaku politik.
- f. Setelah Revolusi Perancis muncul istilah ideologi kiri dan kanan atau tengah. Istilah kiri muncul dari kelompok wakil anti kerajaan Perancis yang duduk diujung kiri. Wakil-wakil rakyat yang setia kepada raja duduk disebelah

¹⁷ Dikutip dari Maurice Doufery, "Pengantar Ilmu Politik", diterjemahkan dalam bahasa arab

kanan. Dan mereka yang moderat duduk ditengah. Bahkan hingga saat ini di Eropa dan dinegara dengan sistem multipartai parati-partai yang sedang memerintah duduk disebelah kanan sedang oposisi disebelah kiri.

Secara etimologis ideologi berasal dari bahasa Yunani, yakni *idea* (ide/gagasan) dan *logos* (studi tentang/ilmu pengetahuan tentang), secara harfiah sebagaimana digunakan dalam metafisika klasik, ideologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide (studi tentang asal-usul ide).¹⁹ Pada mulanya ideologi hanya diartikan sebatas itu, namun kemudian Destut de Tracy, seorang filsuf Perancis mengemukakan pengertian baru tentang ideologi yakni sebagai suatu ilmu pengetahuan baru yang mempelajari gagasan atau (*idea*) manusia serta kadar kebenarannya. Segera setelah itu pengertian istilah ideologi meluas, dan diartikan sebagai keseluruhan pemikiran, cita rasa serta upaya lebih-lebih dibidang politik, pengertian ideologi juga diartikan sebagai falsafah hidup maupun pandangan dunia (*Weistanchaung*).²⁰

Sementara ilmuwan politik Juwono Sudarsono menggambarkan ideologi sebagai seperangkat pemikiran utuh yang mengandung kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang dianggap dapat memberi petunjuk mengenai apa yang "baik" dan apa yang "buruk". Bagi masyarakat tertentu.²¹ Sejalan dengan dengan Juwono, Alfian²² merumuskan Ideologi sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai atau dipegang benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagi kehidupan. Pola pikir yang

¹⁹ Dikutip dari Loren Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996) hlm. 306.

²⁰ Ensiklopedi Indonesia (Jakarta, Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1980), jilid 3, hlm. 1366.

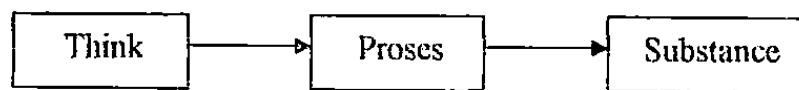
²¹ Juwono Sudarsono, "Ideologi" dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta, Cipta Adi Pustaka 1998). Jilid 7

²² Alfian, "Pembinaan Ideologi" dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta, Cipta Adi Pustaka 1998). Jilid 7

dituankan dalam ideologi tersebut merupakan paduan-paduan dari konsep pola pikir yang mungkin kita dapat artikan dalam tiga bagian, yaitu:

a. Pola Pikir Idealis

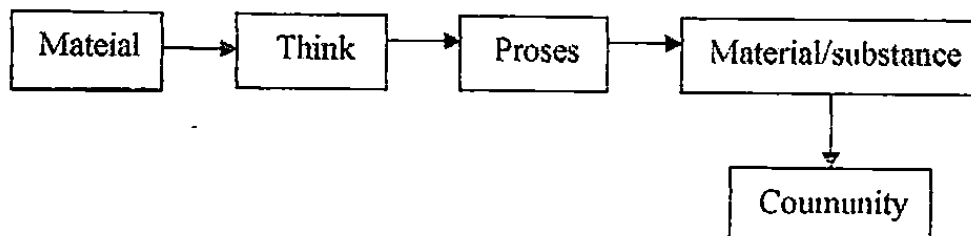
Bagan 1.2
Pola Pikir Idealis



Pola pikir idealis hanya mengandalkan hasil pemikirannya sendiri dalam mencapai sesuatu mulai dari konsep proses dan *maintenance* (pemeliharaan) setelah berwujud semua berdasarkan pemikirannya sehingga substansinya merupakan tujuan akhirnya. Bagi pola pikir idealis cara berpikir dan bersikap yaitu dari pikiran menjadi benda, diman benda merupakan tujuan utama dan tujuan akhir yang harus dicapai.²³

b. Pola pikir materialis/realistis

Bagan 1.3
Pola Pikir materialistis/realistis



²³ Zuhairi, (1992), "Metode Penelitian Kualitatif", p. 100.

Pola pikir realistik ini mengedepankan pemikiran setelah mendapatkan suatu fenomena tertentu terlebih dahulu. Bila penerapannya pada pola negara dapat dilihat keadaan masyarakat yang majemuk dan tingkat/strata kehidupan yang berbeda-beda baik segi generasi, pendidikan bahkan penghasilan.

3. Teori Perbandingan

Teori merupakan konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu, sehingga mampu menjelaskan fenomena secara ilmiah.²⁴ Perbandingan dapat dicoba di antara bagian-bagian dari proses politik dalam berbagai sistem, diantara lembaga-lembaga tertentu, atau diantara sistem-sistem politik-politik sedemikian rupa, untuk menjelaskan masalah-masalah yang kita hadapi, oleh karena itu kita mengadakan perbandingan untuk menemukan kondisi dibawah mana gejala berlangsung, perbandingan dapat bersifat statis ataupun dinamis.

Studi perbandingan mengenai politik sangat formalistik dalam pendekatannya terhadap lembaga-lembaga politik.²⁵

1. Analisisnya dipusatkan pada lembaga formal pemerintah, sehingga merusak yang mendalam dari lembaga-lembaga informal masyarakat beserta peran mereka dalam mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan.

²⁴ Moehntar Mas' oed, "Teori Dan Metodologi Hubungan Internasional". (PAU studi Sosial UGM, Yogyakarta, 1998), hlm. 161.

²⁵ Dikutip dari Roy C. Maeridis, "Comparative politics", diterjemahkan oleh A.R. Henri Sitangah (Jakarta, Erlangga, 1992) hlm. 3-4.

2. Dengan mengabaikan lembaga informal seperti itu, pendekatan tradisional terbukti kurang tanggap terhadap penentu-penentu non politis dari perilaku politik dan karenanya kurang tanggap pula terhadap basis nonpolitik dari lembaga pemerintah.
3. Perbandingan dibuat dari sudut konstitusional formal sistem di negara Barat, yaitu parlemen, pegawai negeri, hukum administratif, dan sebagainya, yang tak perlu dijadikan konsep paling bermanfaat untuk suatu studi perbandingan yang sebenarnya.

Metode studi perbandingan politik pada waktu itu sebagian besar lebih bersifat deskriptif, dan bukannya berfungsi untuk memecahkan/ menjelaskan masalah ataupun menganalisis.

1. Kecuali untuk beberapa studi tentang perwakilan berimbang perundang-undangan darurat, dan sistem pemilu, bidang ini tidak tanggap terhadap hipotesis beserta pembuktiannya.
2. Bahkan dalam suatu pendekatan yang murni deskriptif terhadap sistem politikpun, studi perbandingan kurang tanggap terhadap metode antropologi budaya, yang memiliki uraian berbobot dengan konsep-konsep umum ataupun hipotesis yang utuh.
3. Uraian dalam perbandingan pemerintahan tidak siap menguji hipotesis dan himpunan data yang penting mengenai sebuah fenomena politik atau

4. Orientasi uraiannya tidak sistematis sehingga tidak menemukan hipotesis mengenai keseragaman perilaku politik dan tidak berhasil merumuskan teori perkembangan politik secara perbandingan, (misalnya, mengenai perubahan, revolusi, kondisi stabilitas).²⁶

Bagaiman seseorang harus menghadapi kecenderungan-kecenderungan ini dan mengembangkan suatu pendekatan yang lebih canggih terhadap studi perbandingan? Rumusnya kelihatan sederhana pada waktu itu:

1. Perbandingan melibatkan abstraksi, dan situasi atau proses konkret tidak pernah dapat dibandingkan begitu saja, setiap fenomena adalah unik; setiap manifestasi adalah unik; setiap proses, setiap bangsa, seperti halnya setiap individu, adalah unik dalam hal tertentu. Membandingkan mereka berarti memilih tipe-tipe atau konsep-konsep tertentu. Dan dengan tindakan itu berarti kita telah merusak hal-hal konkret.
2. Sebelum dilakukan perbandingan tidak hanya ditentukan kategori dan konsep, tetapi juga perlu ditentukan relevansi komponen tertentu dari situasi sosial dan politik terhadap permasalahan yang dianalisis (misalnya relevansi stratifikasi sosial terhadap sistem keluarga, atau "letak wilayah" terhadap ketidakstabilan politik)
3. Perlu dibentuk kriteria agar dapat menunjukkan secara memadai

4. Dalam upaya mengembangkan suatu teori politik, perlu dirumuskan analisis yang timbul baik dari konteks yang konseptual, maupun dari perumusan suatu masalah.
5. Perumusan berhubung-hubungan dan penelitian hubungan itu terhadap data empiris tidak pernah dapat menghasilkan bukti. Suatu hubungan hipotesis atau serangkaian hipotesis akan dipandang terbukti, yakni, verifikasi, hanya sejauh ia dapat teruji secara benar.
6. Serangkaian hipotesis, dan bukan hipotesis-hipotesis tunggal, harus dirumuskan. Dalam masing-masing hipotesis ini rantai penghubung antara serangkaian hipotesis umum dengan hubungan-hubungan social tertentu harus diperlihatkan dengan merinci kondisi tempat semua kemungkinan yang ditunjukkan dalam rangkaian itu diduga akan berlangsung.
7. Studi perbandingan walaupun hanya memberikan suatu teori politik secara umum saja, dapat perlahan-lahan merintis jalan menuju pengembangan teori dengan: (1) memperkaya kesanggupan imajinasi kita untuk merumuskan hipotesis, dalam pengertian bahwa "outsidedness" (pihak luar) manapun memungkinkan kita untuk memahami satu sistem sosial; (2) memberikan sarana untuk menguji hipotesis; dan (3) menyadarkan kita bahwa sesuatu yang kita pandang benar membutuhkan penjelasan.
8. Akhirnya, salah satu bahaya terbesar dalam membuat hipotesis

hubungan-hubungan sampai tak terbatas. Hal ini dapat dihindari dengan mengumpulkan data secara teratur sebelum membuat hipotesis. Pengumpulan data yang teratur ini dapat membantu mengenali hubungan-hubungan yang tidak relevan (suasana sistem pemilu, bahasa dan teknologi industri, dan sebagainya). Pengenalan seperti ini dengan sendirinya membutuhkan suatu studi data yang terkelola. Oleh karena itu, penting sekali dikembangkan sistem klasifikasi yang kuat sebelum merumuskan hipotesis.

E. Pembatasan Masalah

1. Penulis membatasi penulisan skripsi ini hanya pasca proklamasi RI tepatnya dari tahun 1945-1949 karena dalam kurun waktu inilah Indonesia mengalami revolusi. Revolusi yang dipandang sebagai manifestasi tertinggi dari tekad nasional, lambang kemandirian suatu bangsa, dan bagi mereka yang terlibat didalamnya, sebagai suatu pengalaman emosional yang luar biasa dengan rakyat-rakyat secara keseluruhan berpartisipasi langsung.
2. Dalam penulisan kali ini penulis akan membatasi pembahasan hanya tentang ideologi Sjahrir tentang Revolusi di Indonesia, Perjuangan Kita dan Sosialisme Kerakyatan dengan Ideologi Tan Malaka dalam Revolusi di Indonesia, Minimum Program dan Revolusi Sosial. Namun penulis tidak bisa lepas dari peristiwa - peristiwa sebelumnya yang melatar

suatu hal penting untuk membantu memberi gambaran seobyektif mungkin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan disini adalah jenis penelitian yang bersifat *deskriptif komparatif*, dimana penelitian *deskriptif komparatif* ini adalah jenis yang digunakan untuk mendeskripsikan objek-objek, kasus-kasus dan situasi-situasi dengan teliti. Dimana penelitian ini mencoba merangkai kenyataan menjadi sebuah cerita (*narration*), yakni menguraikan secara teratur satu masalah, keadaan atau peristiwa sebagai mana adanya.²⁷ Penelitian kali ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan jenis *deskriptif*, yakni suatu penelitian yang menghasilkan data secara *deskriptif* (penggambaran) yang berupa fakta-fakta tertulis maupun lisan dari setiap perilaku orang-orang yang dicermati. Menurut Jalaludin Rahmat, penelitian *deskriptif* merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dengan mengumpulkan data secara *univariatif*²⁸. Metode *deskriptif* bertujuan melukiskan secara faktual dan cermat namun melaksanakan metode *deskriptif* tidak terbatas sampai pada pengumpulan data tetapi juga meliputi analisa interpretasi arti data itu. Karena penelitian bersifat *deskriptif* mampu merinci secara lengkap keadaan, gejala, atau kelompok

²⁷ Anton Bakker dan Achmad Chariss Zubair, "Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta, Kanisius, 1990), hlm. 54

²⁸

tertentu.²⁹ Pemahaman atas *metode komparatif* ini mengakui kemungkinan bahwa upaya perumusan teori dan metode baku dalam studi perbandingan politik tidak selalau berhasil.³⁰ Jalur-jalur perbandingannya sudah terbentuk, namun setiap kegiatan studi sejauh ini masih dihalangi secara kompleksitas penelitiannya sendiri. Berbagai riset *komparatif* ambisius telah mengumpulkan banyak data dari berbagai negara, namun semuanya masih bersifat *deskriptif*. Yang dimaksud dengan deskriptif adalah meneliti gambaran tentang sifat-sifat dari kedua tokoh tersebut yang mempengaruhi pemikirannya.³¹ Sedangkan *komparatif* adalah merupakan relasi dua pemikiran tokoh-tokoh diatas dengan membandingkan antara keduanya. Dalam kaitan ini, komparasi tersebut, sifat hakiki dalam objek penelitian dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Komparasi ini menentukan kesamaan dan perbedaan pemikiran antara kedua tokoh tersebut.³²

2. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang diperlukan dari penulis ini dalam memecahkan suatu masalah adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dari buku yang ditulis oleh Sutan Sjahrir dan Tan Malaka sendiri.

²⁹ Koentjoroningrat, "*Metode-metode Penelitian Masyarakat*" (Jakarta, Gramedia 1977), hlm. 35.

³⁰ Ronald H. Chilcote, "*Teori Perbandingan politik*" (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2003) hlm. 30

³¹ Kamaruzzaman, "*Relasi Islam Dan Negara*" (Magelang, Yayasan Indonesiatera 2001) hlm. 8

³² Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, "*Metodologi Penelitian filsafat*" cet VII (Yogyakarta, Kanisius, 1999) hlm. 51

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari berbagai macam buku yang ditulis oleh para ahli sejarah tentang Sutan Sjahrir dan Tan Malaka, dan berbagai macam komentar dari para tokoh yang diperoleh dari berbagai macam artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dan sumber data pada penelitian kali ini merupakan penjelajahan pustaka (*library research*), yakni bahan perpustakaan dijadikan sebagai sumber utama. Karena ini penelitian tokoh, maka ada dua metode yang fundamental untuk memperoleh pengetahuan tentang tokoh tersebut, dan kedua-duanya digunakan secara bersamaan. Pertama adalah penelitian pikiran dan keyakinan kedua tokoh tersebut, dan yang kedua adalah penelitian tentang biografinya sejak permulaan sampai akhir.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh diklarifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Selanjutnya menganalisa dengan gejala-gejala atau obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atas teori yang ada serta runtut memakai makna

laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan

gambaran umum tentang ...